

Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh

by Herman Herman

Submission date: 20-Mar-2023 08:16AM (UTC+0700)

Submission ID: 2041067513

File name: 8325-Article_Text-28086-1-18-20230315.pdf (357.36K)

Word count: 6550

Character count: 41094

Collaborative Governance Dalam Menanggulangi Banjir di Kota Sungai Penuh

Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh

Herman¹⁾, Antri Kurniawan²⁾, Dendi Bayu³⁾

E-mail: herman@unswi.ac.id, antri@unswi.ac.id, dendibay@unswi.ac.id

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

²⁾ Corresponding author

Hikayatikan: 01-03-2023; Disetujui: 10-05-2023; Diterbitkan: 18-08-2023

DOI: <https://doi.org/10.30798/ijmp.v1i1.3523>

Abstract

Sungai Penuh City consists of several sub-districts that are prone to flooding every year, namely Tanah Kuning District, Harau District, and Kota Baru District. Therefore, the Regional Disaster Management Agency (DRPD) for the City of Sungai Penuh is trying to deal with the flood. The purpose of this study is to analyze and explain how collaborative governance in overcoming flooding in the City of Sungai Penuh. The type of research used is qualitative research with descriptive methods by prioritizing research aids, namely observation, interviews and documentation. Informants in this study are stakeholders who are directly involved in tackling floods in three sub-districts consisting of the Chairman of the Regional Disaster Management Agency for the City of Sungai Penuh, Head of the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR) for the City of Sungai Penuh, Head of the Housing and Settlement Services, Sungai Penuh City and Communities affected by flooding. This study uses collaborative governance theory to see the extent to which the achievements and weaknesses of flood control have been achieved. The results of this study have not fully gone well due to the fact that modern collaboration has not been created between related agencies appointed by the Mayor of Sungai Penuh City in flood prevention. In the future, it is hoped that the DRPD of Sungai Penuh City can cooperate with other agencies in dealing with floods. In addition, the DRPD of Sungai Penuh City must continue to provide outreach and simulations, especially during the rainy season so that the people of Sungai Penuh City can prepare themselves from an early age.

Keywords: Collaborative Governance, Flood, City of Sungai Penuh

Abstrak

Kota Sungai Penuh terdiri dari beberapa Kecamatan yang terkena tanggapan banjir pada setiap tahun yaitu Kecamatan Tanah Kuning, Kecamatan Harau dan Kecamatan Kota Baru. Oleh sebab itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh berupaya dalam rangka untuk menanggulangi banjir tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana kolaborasi governance dalam menanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan stakeholder yang terlibat langsung dalam menanggulangi banjir di 3 Kecamatan yang terdiri dari Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sungai Penuh, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Sungai Penuh serta Masyarakat yang terkena banjir. Penelitian ini menggunakan teori collaborative governance untuk melihat sejauh mana keberhasilan dan kelemahan dari penanganan banjir. Hasil dalam penelitian ini belum sepenuhnya berhasil dengan baik dikarenakan belum terpacunya kolaborasi yang modern antara instansi yang terkait yang ditunjuk oleh Walikota Sungai Penuh dalam penanggulangan banjir.

Kecapaian dibarengi dengan APBD Kota Sungai Penuh dapat dilaksanakan dengan inovasi lain dalam penanggulangan banjir. Selain itu APBD Kota Sungai Penuh masih terus terus berinovasi dan semakin lebih lebih pada sistem pengujian agar masyarakat Kota Sungai Penuh dapat memperoleh diri sejak dini.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Banjir, Kota Sungai Penuh*

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan daerah tropis yang rentan terhadap berbagai kejadian alam atau bencana (Arlan, 2016) seperti banjir, gempa tektonik, gempa bumi, dan lain sebagainya. Dampak utama dari bencana seringkali berakibat kepada kematian, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan kerugian non-materi dan psikologis (Setyawan, 2019). Salah satu bencana yang kerap kali melanda negara Indonesia adalah bencana banjir (Ramatuhan et al., 2021), yang mana banjir ini merupakan bencana alam yang terjadi di kawasan yang banyak dilalui oleh aliran sungai (Maulida et al., 2004). Secara sederhana, banjir didefinisikan sebagai kadarnya air ke suatu kawasan luas sehingga menstasi permukaan bumi kawasan tersebut (Muhammad & Iqbal, 2020). Banjir menyebabkan kerusakan serta mengganggu kegiatan perekonomian serta aktifitas masyarakat (Faita et al., 2022). Bencana banjir ini merupakan urutan pertama didunia yaitu mencapai 15%, dan di Indonesia mencapai 30% dari total keseluruhan bencana (Kusuda & Iqbal, 2017). Banyak kerugian yang muncul disebabkan oleh banjir, baik dari segi materi (harta benda) maupun dari segi moral (kepercayaan) (Ramatuhan et al., 2023), oleh sebab itu maka pemerintah dalam hal ini membuat rencana dan program untuk penanganan bencana melalui mitigasi bencana baik pra bencana, maupun pasca bencana (Arlan, 2022).

Kota sungai penuh merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Kota Sungai Penuh mempunyai luas daerah sebesar 39.358 Ha dengan jumlah penduduk 88.918 jiwa terdiri dari 6 Kecamatan dengan jumlah 65 desa dan 4 kelurahan (Munzir Zakaria, 2021). Kota Sungai Penuh setiap tahunnya merupakan daerah langganan banjir, setiap musim hujan dan dan air sungai meluap meluap Kota Sungai Penuh selalu terjadi bencana banjir (Marhazari, 2020). Dari 6 Kecamatan yang ada di Kota Sungai Penuh terdapat 3 kecamatan yang terdapat langganan banjir setiap tahunnya yaitu Kecamatan Tanah Barung, Kecamatan Harau Barung dan Kecamatan Batu Bara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Kota Kecamatan yang Terkena Banjir

No	Kecamatan	Keterangan
1	Tanah Karawang	Terkena Banjir
2	Sukasari	Tidak Terkena Banjir
3	Sungai Penuh	Tidak Terkena Banjir
4	Pematang Tinggi	Tidak Terkena Banjir
5	Sungai Unggul	Tidak Terkena Banjir
6	Hamparan Kandang	Terkena Banjir
7	Pematang Tinggi	Tidak Terkena Banjir
8	Kota Baru	Terkena Banjir

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh 2023.

Seperti yang diketahui bahwa Kota Sungai Penuh mengalami banjir terutama untuk 3 Kecamatan diatas. Total dari ke 3 Kecamatan tersebut terdapat beberapa desa, Kecamatan Tanah Karawang terdiri dari 14 Desa, Kecamatan Hamparan Kandang terdiri dari 13 Desa, dan Kecamatan Kota Baru terdiri dari 5 Desa. Berdasarkan data dari BPS Kota Sungai Penuh terdapat beberapa Desa yang terdampak banjir yaitu Kecamatan Tanah Karawang sebanyak 3 Desa, Kecamatan Kota Baru sebanyak 5 desa, Kecamatan Hamparan Kandang sebanyak 13 desa, dan Kecamatan Hamparan Kandang ini merupakan Kecamatan yang terdampak banjir. Dilansir dari metrojember.com pada tanggal 25- Februari 2023, terdapat 9.628 jiwa yang terdampak banjir dimana bencana banjir di Kota Sungai Penuh ini disebabkan oleh melimpahnya dan mengalir yaitu Sungai Banting, Merusi dan Sungai Batang Sangir yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Lebih lanjut, berdasarkan catatan dari BPS Kota Sungai Penuh sudah empat kali banjir merendam daerah tersebut (metrojember.com, 2023).

Penanganan banjir di Kota Sungai Penuh dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Kota Sungai Penuh, dan pusat masyarakat lainnya. Salah satu instansi terdapat dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibantu dengan BPSD yang dibentuk pada tahun 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah.

Begitu banyak penelitian yang mengkaji mengenai aspek collaborative governance dalam penanganan banjir yang salah satunya adalah dalam penanganan banjir di Jakarta dan Semarang yang melibatkan partisipasi perusahaan yang berkontribusi secara penuh untuk mengurangi risiko banjir (Noto & Dico, 2018). Kemudian penelitian yang mengkaji mengenai penanganan banjir di Kota Medan dimana pada hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa penanganan banjir memiliki keterkaitan dengan aspek governance dan distributive accountability dimana hasil akhir dari collaborative lebih dititikberatkan pada aliter akademisi untuk berpartisipasi

agar berguna dalam fase mitigasi dan pemulihan (Harjanto, 2021; Situlaha, 2022). Kemudian penelitian yang mengkaji mengenai *collaborative governance* dalam penanganan banjir di Kabupaten Kepulauan Sula dimana kolaborasi antara aktor belum berjalan baik yaitu antara pemerintah kepentingan yang terlibat dalam penanganan banjir dan akademisi. Sedangkan kendala dalam penelitian tersebut adalah kurangnya sumber daya, dan anggaran dan peralatan (Husnida et al., 2022). Penelitian selanjutnya adalah *collaborative governance* penanganan banjir di Desa Tanggapani Kecamatan Cikarang Utara dimana IPBD Kabupaten Bekasi belum maksimal dalam memegang kendali baik dari kepemimpinan fasilitasi, desain kelembagaan serta proses kolaborasi terutama kepada pihak swasta dan masyarakat (Setiawan et al., 2021).

Selain penelitian yang bertemakan banjir, masih juga memebah kan penelitian yang bertemakan tanggap bencana dan bencana adalah *Penganggulangan Pra-Bencana Alam Terhadap di Kabupaten Lampung Selatan* dan *Pemerkaitan Collaborative Governance*, hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa upaya *collaborative* yang dilakukan sangat membantu dalam upaya *pra bencana alam tsunami* dengan mengoptimalkan anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, upaya pendataan dan mitigasi bencana (Nurkhalet al., 2022). Penelitian dengan tema bencana selanjutnya adalah *Collaborative Governance* pada Revitalisasi Sungai Sekeloa di Kota Palembang, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palembang telah menerapkan *collaborative* dalam revitalisasi Sungai Sekeloa di Kota Palembang. Oleh sebab itu pemerintah Kota Palembang harus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya terhadap masyarakat dalam rangka revitalisasi Sungai Sekeloa Kota Palembang (Iqar, 2021). Penelitian dengan judul *collaborative governance* dalam penanganan Rob di Kelurahan Bendungan Kota Palembang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *collaborative* belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya kemampuan antara para pemangku kepentingan serta kurangnya sumber daya, dan kurangnya kesadaran dalam mengatasi banjir rob (Matiarawati & Sudarna, 2021).

Melihat dari berbagai literatur diatas maka Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu melakukan *collaborative governance* agar penanganan banjir membutuhkan banyak pihak terutama keterlibatan masyarakat serta instansi terkait dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh. Oleh sebab itu, untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan teori yang digunakan oleh Ansell & Gash yang terdiri dari kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitasi, dan proses kolaborasi (Al Hafid et al., 2021). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut



Sampul 1. Model Collaborative Governance (Santika, Asri & Tuh, 2018)

Gambar diatas menunjukkan bahwa collaborative governance terdiri dari empat tahapan yang terdiri dari kondisi awal, desain institusional, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi. **Kondisi awal** merupakan penjelasan mengenai kondisi awal yang ada di dalam sebuah organisasi atau instansi, baik dari manajemen, sumber daya, serta kapabilitas dari organisasi tersebut. Dari sini, kondisi awal juga menunjukkan secara terperinci mengenai kondisi atau gambaran dari suatu instansi, gambaran ini diberikan untuk memisahkan perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya kolaborasi tersebut (Tando et al., 2019). Desain institusional atau kerangka yang ada pada saat pelaksanaannya adalah bentuk minimali kondisi-kondisi serta kurang bekerja secara optimal. Desain institusi merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu kolaborasi pada penerapannya karena dapat mengatur tentang proses kolaborasi, kedudukan serta tugas, fungsi dan tanggung jawab oleh keluarga-keluarga yang terlibat (Zobaidi, 2018). Desain instansi atau kerangka yang ada pada saat ini dalam suatu kolaborasi kolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah kekonstruksian secara mandiri dalam proses berkolaborasi tersebut (Astuti et al., 2020). **Keperimpinan fasilitatif** juga menjadi salah satu aspek penting dalam kolaborasi (Machwal et al., 2020), dimana kepemimpinan merupakan bagian dari kapasitas atau kemampuan dalam praktik collaborative governance (Dewi, 2019). Dua yang terakhir adalah proses kolaborasi dan atau proses kolaborasi ini merupakan suatu yang bersifat tidak yang berkaitan pada komunikasi, kesesuaian, koordinasi, penemuan dan hasil. Jika dapat dipahami bahwa proses kolaborasi merupakan suatu interaksi yang berlingkang-diantar stakeholders yang terkait dengan keterlibatan dalam suatu keputusan (Ipau et al., 2021).

Terdapat beberapa penelitian yang menyangkut tema mengenai penanganan banjir di Kota Sungai Penuh, namun belum ditemukan penelitian yang menyangkut tema dengan teori collaborative governance. Penelitian yang dilakukan oleh Yetty dik dengan judul Pemetaan Wilayah Bahaya Banjir di Kota Sungai Penuh, hasil temuan yang dilakukan berupa memetakan wilayah mana yang terdampak banjir dan wilayah yang tidak terdampak banjir (Yetty et al., 2018). Kemudian penelitian oleh Mandasari dengan judul Penanggulangan Bencana Banjir di Sungai Batang Meru-Pada Daerah Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019, dalam penelitian ini penanggulangan banjir dilakukan dengan cara pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi (Mandasari, 2020). Penelitian dengan judul Geologi dan Potensi Kerusakan Banjir Bandang Desa Sungai Jerih dan Sekelarnya Provinsi Jambi, dalam penelitian ini juga dilakukan mengenai pemetaan banjir dan mengidentifikasi daerah mana yang rawan terhadap dampak banjir yang tinggi dan salah satunya adalah Kecamatan yang menjadi teliti (Purmelian et al., 2022) . Penelitian dengan judul Pengaruh Penyuluhan dengan Media Audiovisual Terhadap Perilaku Masyarakat Tentang Penanganan Menghadapi Bencana Banjir di Desa Tanjung Kecamatan Hangeran Rawang Provinsi Jambi, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada pengaruh pembelajaran penyuluhan dengan media audiovisual terhadap masyarakat tentang penanganan banjir di Desa Tanjung Kecamatan hangeran rawang (Ferdia et al., 2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Drainase Yang Berkelanjutan Berbasis Partisipasi Masyarakat Kota Sungai Penuh diteliti dalam penelitian ini menyajikan bahwa hubungan antara variabel aspek fisik terhadap keberlanjutan drainase perkotaan berpengaruh positif dan signifikan (Mulya et al., 2021). Kemudian penelitian yang berjudul Multi-role, integratol strategies for urban flood resilience dimana dalam penelitian ini diharapkan pemerintah dalam hal ini legislatif dan eksekutif dapat bekerja sama untuk memberikan solusi adaptasi sebelum bencana banjir terjadi (Adryya & Irenita, 2017) dapat menjadi kerangka pelaksanaan penanggulangan bencana banjir (Maggya et al., 2020), serta peran optimal dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi banjir (Maggya et al., 2021).

2. Metode

Sebagaimana telah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan teori yang diungkapkan oleh Ansell & Gash yang terdiri dari 4 tahapan yaitu **kelembagaan, desain institusional, kepemimpinan kolektif dan proses kolaborasi**. Untuk validasi **kelembagaan** (tara yang penentu nilai terdiri dari kegiatan untuk memberikan arah dan petunjuk, sumber daya yang terdiri dari manusia dan peralatan, serta sejauh dimana

langkah dalam hal kerjasama dan atau konflik. Selanjutnya indikator dengan institutional participasi adalah elemen lembaga, aturan dasar yang jelas serta transparansi proses. Indikator keberlanjutan kualitatif terdiri dari keterbukaan pemilihan, keberanian dan menerima asetnya. Sedangkan indikator terahbir yaitu proses keahlihan yang terdiri dari dialog tetapi tidak, membangun kepercayaan dan pemerintahan bersama.

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode kualitatif (qualitative research) (Fahyuni, 2018), dengan pendekatan deskriptif. Menurut Drossell Pendekatan penelitian dengan metode ini dimulai dengan penafsiran teori, masalah serta studi tentang permasalahan bagaimana individu atau kelompok memahami permasalahan tersebut (Rahmadani et al., 2022). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menginterpretasikan secara wawancara, observasi dan dokumentasi (Cahyani, 2017). Penggalian informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu menggunakan informasi dari orang-orang yang dapat memberikan informasi dan mampu memahami serta membantu dalam penelitian (Rahmadani et al., 2022), karena informasi merupakan unsur yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan di wilayah penelitian (Ariani & Rendiati, 2022). Adapun informasi dalam penelitian ini adalah tentang yang telah mengungkap dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Kota Sungai Penuh, dan masyarakat. Teknik Analisis data dengan melibatkan beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab banjir di Kota Sungai Penuh diantaranya adalah 1) Meluasnya sungai yang ada di Kota Sungai Penuh, 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, 3) Drainase yang kurang memadai, 4) Cangk bajan yang tinggi pada setiap tahun, 5) Banyaknya pemukiman di bantaran kali atau sungai (Rendi, 2022). Dalam pelaksanaan penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh diperlukan kolaborasi diantara instansi terkait, peran masyarakat ini penting karena sejadi ini untuk penelitian kolaborative governance belum diterapkan terkhusus untuk Kota Sungai Penuh tersebut. Menurut pendapat Council dan Dey, dikatakan bahwa kolaborative governance merupakan sebuah persawahan dari semua kepentingan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (Micalozzo, 2019). Berkaitan dengan hal diatas, berikut penulisa paparkan mengenai kolaborasi multi aktor dalam penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh yang terdiri dari aktor internal dan aktor eksternal sebagai berikut:

Tabel 2. Persebaran Aktor dalam Penanggulangan Banjir Kota Sungai Penuh

No	Aktor	
	Internal	Eksternal
1	Bupati - Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh	Masyarakat
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh	Permodal/Pada/ Masyarakat
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKPP) Kota Sungai Penuh	Tetap ada bencana
4	Badan TNI Kota Sungai Penuh	
5	Dinas Sosial	

Sumber: BPBD Kota Sungai Penuh 2021

Dari tabel diatas jelas bahwa banyak aktor yang terlibat dalam penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh dimana semua aktor yang terlibat mempunyai tugas dan masing-masing sesuai dengan kewenangannya yang berlaku. Untuk aktor internal diartikan oleh BPBD Kota Sungai Penuh yang berkoordinasi langsung dengan Wakil Kota Sungai Penuh dan mempunyai kewenangan lebih dalam penanggulangan banjir yang tertera tem dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana pada pasal 25 ayat 2 dijelaskan bahwa dalam keadaan darurat bencana BPBD mempunyai kewenangan **aktor** yaitu: a) pengarahannya **aktor** dengan instansi, b) pengarahannya **aktor**, c) pengarahannya **aktor**, d) pengalihan barang dan jasa, e) pengalihan dan pertanggungjawaban uang dan atau barang, f) penyelamatan dan g) koordinasi untuk memobilisasi instansi/lembaga. Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh melakukan tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah untuk membangun drainase untuk mengurangi resiko banjir. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKPP) Kota Sungai Penuh melakukan tugas dan kewenangannya yang berkaitan dengan penanganan pasca bencana untuk perbaikan. Dinas Sosial Kota Sungai Penuh bertugas memberikan bantuan baik berupa logistik maupun keperluan lain yang dibutuhkan pada saat banjir. Sedangkan dari pihak Badan TNI membantu melakukan evakuasi jika memang dibutuhkan. Dan untuk masyarakat sendiri sudah tentu membantu masyarakat lainnya jika bencana banjir ini melanda, baik dari tahap persiapan hingga tahap evakuasi. Namun menurut pengamatan penulis lapangan, aktor yang berperan sangat dominan adalah BPBD Kota Sungai Penuh dikarenakan instansi ini mempunyai baik dari kewenangan yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh yaitu pasal Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Sedangkan aktor yang tidak berperan sama sekali adalah pihak swasta dalam hal ini perusahaan yang terdapat di Kota Sungai Penuh.

Dalam penelitian ini penulis tidak lupa untuk membahas mengenai indikator penelitian

yang penulis kutip dari Anwar & Gadh, diawali dari indikator pertama yang terdiri dari:

a) **Manajemen Asset**

1 Dalam pelaksanaan banjir di Kota Sungai Penuh, dalam hal ini tanggung jawab dari Wali Kota Sungai Penuh melalui **Dewan Perancang Kota Kecamatan Daerah (DPKD) Kota Sungai Penuh**. Sejalan ini pelaksanaan penanganan banjir dilakukan dengan cara kerjasama yang dilakukan oleh multi aktor. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala **DPKD Kota Sungai Penuh** diungkapkan bahwa **DPKD Kota Sungai Penuh** tidak punya kekuatan penuh dalam rangka untuk memberikan arahan dan perintah kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan banjir. **DPKD Kota Sungai Penuh** hanya mempunyai kekuatan memberikan arahan dan perintah hanya kepada internal DPKD, dan untuk instansi lain hanya melalui Kerjasama, koordinasi dan komunikasi saja. Berdasarkan hal diatas penulis dapat menyimpulkan berdasarkan bahwa setiap instansi atau aktor yang terlibat dapat penanggulangan banjir di **Kota Sungai Penuh** sudah mempunyai tugas dan tanggungjawab masing-masing dan dapat memberikan laporan serta pertanggungjawabannya kepada **Wali Kota Sungai Penuh**.

Sedangkan daya dalam penanganan banjir ini terdiri dari sumber-daya manusia, dan sumber-daya peralatan. Untuk sumber daya manusia dilihat memadai, karena yang terlibat dalam penanganan banjir di **Kota Sungai Penuh** ini selain instansi terkait, sebagaimana telah penulis ungkapkan diatas, juga terdiri dari unsur masyarakat pada penduduk yang bergabung dalam pemada peduli lingkungan dan tokoh adat setempat. Namun untuk peralatan dan perlengkapan penulis menilai belum memadai dan hal ini juga sudah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh **Mardiana et al (2019)** bahwa dalam penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh masih terdapat **peralatan yang belum memadai** serta **sarana dan prasarana belum sepenuhnya ada seperti tenda yang** digunakan untuk tempat evakuasi sementara bagi masyarakat pada saat banjir melanda. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala **DPKD Kota Sungai Penuh** bahwa fasilitas dan sarana prasarana dalam penanggulangan banjir sudah kurang terencana secara terencana dan terencana dan tanggul perbatasan banjir yang dibudidayakan oleh pihak **PUPR Kota Sungai Penuh**. Seperti yang diketahui pembangunan drainase perlu dilakukan dalam upaya penanggulangan banjir (**Prasetya et al, 2019**) dan pembangunan tanggul juga merupakan upaya untuk meminimalkan terjadinya banjir (**Haryandhan et al, 2023**). Kemudian fasilitas lainnya seperti tenda pada saat evakuasi warga yang terdampak banjir juga masih kurang jika terjadi banjir besar.

Untuk kerjasama antara instansi juga terlihat belum memadai yang salah satunya adalah kerjasama antara **PUPR Kota Sungai Penuh** dengan beberapa Kepala Desa yang ada di Kota Sungai Penuh dimana permasalahan yang terjadi adalah pada saat pemadatan

drainase yang dibangun oleh Kepala Desa yang desanya yang terdampak banjir, namun pembangunan drainase yang dilakukan oleh PUPH Kota Sungai Penuh yang diawasi oleh BPED Kota Sungai Penuh belum sesuai harapan karena Drainase yang dibangun belum cukup untuk mengantisipasi tingkat banjirnya pada setiap tahunnya. PUPH berdalih bahwa untuk pembangunan drainase tidak bisa dilakukan secara menyeluruh karena pembangunan tersebut dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. Sesuai data yang penulis terima, untuk pembangunan drainase untuk tahun 2023 ini di lakukan di Kecamatan Harapan Rawang dikarenakan Kecamatan ini dampak banjirnya sangat besar. Selain desa yang dibangun drainase hanya 3 desa dari total 13 desa yang ada, dan Panjang drainase total sepanjang 1.847,29 meter dengan biaya sebesar Rp. 393.182.889,00. Tidak bisa diragukan bahwa pembangunan drainase tersebut menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial antara satu desa dengan desa lainnya, namun sekali lagi PUPH Kota Sungai Penuh berdalih untuk melakukan pembangunan PUPH mengalami keterbatasan anggaran, oleh sebab itu pembangunan drainase dilakukan secara bertahap. Kemudian untuk pembangunan di desa lain baik itu berupa drainase maupun tanggul dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dengan pola prioritas dalam artian desa mana yang mengalami banjir terparah maka desa tersebut yang akan dibangun drainase dan tanggul. Menurut hasil penelaah, pembangunan drainase dan tanggul untuk langkah awal penanganan atau pencegahan banjir di Kota Sungai Penuh merupakan langkah yang efektif. Pembangunan drainase dan tanggul harus dilakukan secara hati-hati dan profesional agar mampu mengalirkan air banjir, begitu pula pembangunan tanggul harus dirancah dengan hati agar mampu bertahan lama serta. Namun yang tak kalah penting adalah edukasi terhadap masyarakat mengenai pengelolaan sampah dalam artian arahan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.

b) Desain Institutional

Hasil penelitian dari indikator Desain Institutional yang diteliti dari partisipan secara individual menunjukkan bahwa kepala ini sebagai instansi serta elemen masyarakat sudah terlibat dalam penanganan banjir di Kota Sungai Penuh. Oleh dikarenakan banjir ini terjadi pada setiap tahunnya, maka penulis menilai kinerja dari masing-masing instansi patut dipertanyakan. Berdasarkan wawancara pribadi dengan pihak BPED Kota Sungai Penuh penulis menyimpulkan bahwa tidak semua hal bisa dilakukan oleh pihak BPED untuk memberikan arahan secara menyeluruh kepada instansi yang terlibat, karena dalam penanganan banjir ini melibatkan banyak instansi dan koordinasi lintas instansi sesuai dengan tugas masing-masing.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari BPS Kota Sungai Penuh dan data hasil penelitian lainnya bahwa banjir dari tiap tahun terus terjadi yang dapat dikkat pada tabel

dibawah ini:

Tabel 3. Rejestrasi Banjir di Kota Sangai Penuh

No	Tahun	Rejestrasi Banjir
1	2010	2 kejadian
2	2019	28 kejadian
3	2020	7 kejadian
4	2021	1 kejadian
5	2022	1 kejadian

Sumber: BPD Kota Sangai Penuh dan Jurnal Publikasi 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap instansi yang terlibat **dalam penanganan banjir di Kota Sangai Penuh dapat** bekerja secara sinergis karena **agar** banjir setidaknya dapat dikurangi bahkan dapat diatasi.

Berkasus mengenai banjir di Kota Sangai Penuh dan bagaimana cara menanggulangi banjir yang dilakukan sudah ada standar dan aturan dari masing-masing bagian. Untuk melibatkan kinerja dalam menanggulangi banjir termasuk regulasi sebagai dasar payung hukum yaitu Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Daerah Kota Sangai Penuh Nomor 22 Tahun 2010 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sangai Penuh dan Perwato Nomor 79 Tahun 2020 tentang Tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sangai Penuh serta Peraturan Daerah Kota Sangai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Mengenal regulasi yaitu Perwato Nomor 79 Tahun 2020 dijelaskan bahwa BPD Kota Sangai Penuh merupakan fungsi untuk berkoordinasi, **komando dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana**. Artinya **BPD Kota Sangai Penuh** diberikan kewenangan **sekuat-kuatnya oleh Wali Kota Sangai Penuh** untuk menanggulangi banjir. Pada dasarnya **BPD Kota Sangai Penuh dalam** rangka untuk **melaksanakan tugas dan fungsinya** sudah memiliki standar yaitu berupa kebijakan dan regulasi diatas.

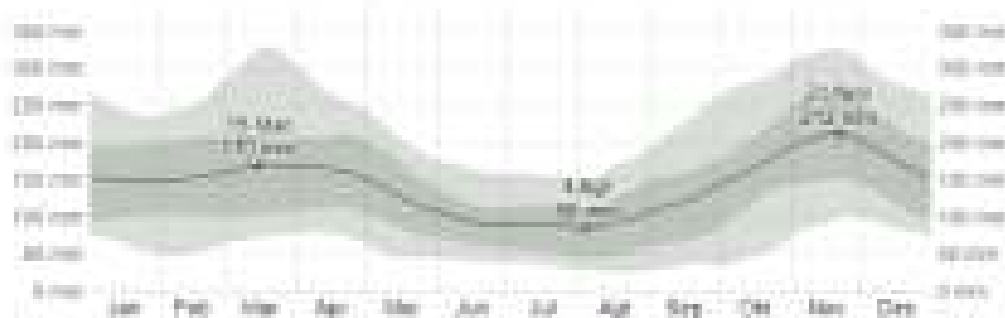
Transparansi proses dalam menanggulangi banjir di Kota Sangai Penuh ini dilakukan agar banjir dapat ditangani baik pada banjir ancaman sebelum banjir, karena transparansi merupakan kegiatan yang terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan (Chenoi et al., 2017). Menurut informasi yang penulis terima bahwa transparansi telah dilakukan dengan baik oleh **para informan penelitian**, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara **menyampaikan secara transparan kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana pangaikan, sedang dan telah** yang dilakukan oleh pihak BPD. Namun pada kenyataannya masih banyak hal-hal yang dinilai dipinggir yang menyatakan bahwa pelaksanaan dalam menanggulangi banjir belum berhasil transparansi yang ditandai dengan **kurang primanya masyarakat dari 3 Kecamatan mengenai penanggulangan bencana sebagaimana**

yang telah pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, menurut penulis, dalam memanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh mesti dikelola secara transparansi dalam memongok, mengatur serta pra bencana maupun pasca bencana.

e) Kepemimpinan Partisipatif

Dalam indikator kepemimpinan partisipatif ini ada beberapa hal yang penulis rilai diantaranya adalah keterbukaan informasi, keberagaman dan martabat manusia. Keterbukaan informasi disini adalah keterbukaan oleh instansi terkait dalam memanggulangi banjir di Kota Sungai Penuh terutama keterbukaan dalam memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan dalam penanganan banjir, misalnya ide dari masyarakat yang nanti diakomodir dalam mengantisipasi dan mencegah potensi bencana banjir di Kota Sungai Penuh dibantu pemerintah sebagai instansi Pemerintah, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha, dan Masyarakat.

Keterbukaan informasi dalam penanganan banjir dalam hal ini adalah DPRD Kota Sungai Penuh telah melakukan sosialisasi dan edukasi keberagaman instansi lain yang bertujuan untuk penanganan banjir karena dapat membantu masyarakat memperoleh informasi secara akurat tentang situasi dan kondisi banjir baik pra maupun pasca banjir. Dalam hal ini DPRD Kota Sungai Penuh memberikan informasi yang akurat mengenai lokasi dan tingkat bahaya banjir yang dilanda pada saat musim penghujan akan tiba karena penyebab banjir di Kota Sungai Penuh adalah luapan air sungai yang disebabkan intensitas curah hujan pada saat musim hujan. Sebagaimana data yang penulis peroleh dari weatherpark.com, curah hujan di Kota Sungai Penuh menurut bulan anggur yang bermartabat pada setiap tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. Rata-rata Curah Hujan di Kota Sungai Penuh

Sumber: weatherpark.com, 2022

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah curah hujan di Kota Sungai Penuh relatif tinggi pada Bulan November yaitu rata-rata sebesar 207 milimeter, dan yang terendah yaitu Bulan Juli dengan rata-rata sebesar 90 milimeter. Dari data diatas maka masyarakat dan

BPBD dapat mengantisipasi bahayanya banjir kerangkaan besar terjadi disekitaran Bulan November pada setiap tahunnya. Oleh sebab itu masyarakat dan BPBD Kota Sungai Penuh secara umum dapat mengantisipasi pada bulan tersebut. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber baik dari data maupun hasil wawancara bahwa BPBD Kota Sungai Penuh telah melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai banjir tersebut sesuai dengan yang telah penulis jelaskan diatas.

Selain itu internet atau lembaga yang menjadi ujung tombak dari penanggulangan bencana ini adalah BPBD Kota Sungai Penuh mesti berani dalam mengambil sikap sebagai instansi yang dianggap mampu untuk menanggulangi banjir. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah menjamin keselamatan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh. Dalam penanganan banjir ini penting sekali untuk diperhatikan oleh semua pihak yang terlibat karena penanganan ini bukan hanya tanggung jawab dari aktor pemerintah saja, melainkan dari semua masyarakat itu sendiri beserta aktor swasta. Sebagaimana informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber dan wawancara dapat penulis simpulkan bahwa BPBD dalam hal ini telah mengambil sikap dengan cara meningkatkan kesadaran bersama dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, membuat sistem peringatan dini banjir utamanya dengan penghapusan, membangun infrastruktur (dikekang), serta melaksanakan kebijakan yang memindahkan pada mitigasi risiko-banjir di Kota Sungai Penuh.

Kemudian BPBD Kota Sungai Penuh mampu mengkomodifikasi masalah ataupun masalah dari masyarakat luas bagaimana keluarga penanganan banjir serta keberangan dibagikan pada saat penanganan. Dalam mengkomodifikasi masalah dan masalah dari masyarakat luas perlu dipertimbangkan untuk dijadikan bahan evaluasi bagi BPBD. Berdasarkan informasi dan wawancara dapat penulis simpulkan bahwa BPBD Kota Sungai Penuh melakukan dialog atau pertemuan dengan masyarakat dimana masyarakat luas untuk memberikan masukan atau saran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan banjir.

d) Proses Kolaborasi

Dialog tetap maka merupakan proses penting dalam mata kolaborasi, karena melalui dialog dengan tetap maka akan merupakan proses terhadap hal yang ingin dicapai bersama. Dalam hal dialog tetap maka yang dilakukan oleh BPBD Kota Sungai Penuh sebagai ujung tombak dalam menanggulangi banjir telah dilakukan secara maksimal, terutama kepada aktor masyarakat yang terdampak banjir. Berikut hal-hal yang telah dilakukan terutama persiapan yang dilakukan dalam rangka untuk menanggulangi banjir yang telah saranya adalah dengan menertibkan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah dimana hal yang dilakukan dalam proses tetap maka adalah

dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang meliputi konsultasi, peringatan dini dan mitigasi bencana. Disamping juga dilakukan setelah banjir terjadi dengan cara mengevakuasi masyarakat yang terdampak, serta memfasilitasi masyarakat apabila masyarakat mengalami kesulitan yang parah, serta membantu korban korban masyarakat.

Dalam hal meningkatkan kepercayaan telah dilakukan oleh BPBD Kota Sanggau Peraih dengan melakukan hal-hal diatas. Artinya dalam penanganan bencana yang terjadi di Kota Sanggau Peraih telah dibantu oleh **Wali Kota Sanggau Peraih** & BPBD Kota Sanggau Peraih dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Berdasarkan informasi dan hasil wawancara yang pernah dilakukan bahwa salah satu bentuk **upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Sanggau Peraih** adalah setiap saat terjadi banjir maka pihak BPBD Kota Sanggau Peraih akan membantu masyarakat, mengevakuasi, serta memfasilitasi masyarakat yang terkena dampak baik berupa bantuan, termasuk kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyaluran dana dan sarana-sarana prasarana.

Pemahaman bersama atau perjanjian yang sama tentang tujuan yang harus dilaksanakan dalam penanganan banjir telah dilakukan oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sanggau Peraih (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUK), Dinas Perikanan dan Perikanan, Badan Kota Sanggau Peraih**, dan **masyarakat yang terdiri dari** pemuda, pejabat lingkungan dan tokoh adat setempat. Dalam pemahaman bersama ini diharapkan tidak terjadi konflik antara satu instansi dengan instansi yang lain dalam penanganan banjir seperti tidak ada perselisihan antara DPUK Kota Sanggau Peraih dengan masyarakat mengenai penanggulangan bencana. Oleh sebab itu dalam penanggulangan banjir di Kota Sanggau Peraih harus terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antar aktor agar tidak terjadi masalah-masalah dalam penanggulangan banjir.

4. Simpulan

Penanggulangan bencana di Kota Sanggau Peraih belum menunjukkan hasil yang memuaskan karena banjir ini terjadi sudah sejak lama, namun hingga saat ini belum ada penanganan yang benar-benar menunjukkan hasil positif. Penulis juga menilai belum ada keefektifan yang komprehensif tentang penanganan banjir dengan cara yang direkomendasikan oleh Arnel & Gask yang diperlukan dengan indikator penelitian yaitu **komunikasi awal, desain institusi, kepemimpinan, tim kerja dan proses kolaborasi**. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik-konflik pemerintah tidak berjalan dengan baik berkaitan dengan penanganan banjir di Kota Sanggau Peraih diantaranya adalah belum tercapainya kerjasama yang maksimal antara instansi terkait yang dituntut oleh **Wali Kota Sanggau Peraih** dalam penanggulangan banjir. Namun demikian,

penulis melalui karya dari **IPAP: Kota Sungai Penuh dalam perancangan banjir** pada **di** apresiasi karena intansi ini merupakan garda terdepan dalam perancangan banjir, walaupun tidak terdapat kerjasama yang baik dengan intansi lain.

Kedepan diharapkan badan IPAD Kota Sungai Penuh dapat bekerjasama secara maksimal kepada intansi yang ditunjuk untuk bersama-sama dari koba-martaba dalam perancangan banjir. Sosialisasi dan simulasi banjir juga terus dilaksanakan lebih-lebih pada saat musim penghujan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri sejak dini jika sewaktu-waktu bencana banjir melanda.

5. Referensi

- Adeyeye, K., & Ennals, S. (2017). Multi-scale, integrated strategies for urban flood resilience. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 8(5), 494-520. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-11-2016-0044>
- Al Hafid, R. I., Warsana, H., Laranas, E., & Purnawati, H. (2021). The paradigm of collaborative governance in improving rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67. [https://doi.org/10.30661/2522-1566/2021-3\(17\)-55](https://doi.org/10.30661/2522-1566/2021-3(17)-55)
- Arifan, M. (2022). Kolaborasi Pemerintah dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana pada Destinasi Wisata Di Desa Kelungayan Selorjo. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(1), 104-120. <https://doi.org/10.46799/jama.syntaxtransformation.v3i1.457>
- Arifin, R. W. (2016). Pemanfaatan Teknologi Informatika Dalam Perancangan Bencana Alam Di Indonesia Berbasiskan Web. *Kyoc Journal of Journal*, 3(1), 1-6.
- Asmat, H., Warsana, H., & Rachim, A. (2020). Sungai Collaborative Governance. In *Universitas Djoeangoro Press*.
- Accomalia, R. G., & Harikiani, A. (2022). Strategi Pelayanan Publik Polres Cilegon Sebagai Satuan Kerja Berprestasi Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *Jogor*, 8(2), 224-238.
- Daryadi, A. (2017). PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kota Tunda Prodada Berbasis Good Governance Di Kecamatan Salsabila Salsabaja). *IPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.30998/ipap.v3i2.1255>
- Dewi, R. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance (Dalam Studi Kebijakan Publik). *Jurnal Dunia-Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.30043/jids.v3i2.2188>
- Fauzi, I. M., Damarwan, G., & Andriani, W. (2022). Tinjauan Protaka Sistematis: Penerapan Metode Machine Learning untuk Deteksi Bencana Banjir. *Jurnal Majo Polgar*, 11(2), 59-63. <https://doi.org/10.31195/jmg.v11i2.11657>
- Fernalia, F., Wahyuni, S., & Hanifah, H. (2021). Pengaruh Penyidulan Dengan Media Audiovisual Terhadap Pengertahuan Masyarakat Tentang Perancangan Menghadapi Bencana Banjir Di Desa Tanjung Karangatan Kabupaten Karangasem Provinsi Jember. *Makalah/Nasional Journal*.

3(4), 507-519. <https://doi.org/10.33024/ifap.v5i4.3257>

- Hartono, Y. (2022). *Kajian Literatur Sistematis Pembangunan Desa Berkelanjutan: Analisis Pada Basis Data Scopus Penelitian Tahun 2018 Sampai 2021*. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 209-218. <https://doi.org/10.47441/jkg.v7i2.264>
- Iqbal, Farnasari, H., & Priyanti, S. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting Anak. *IAQ*, 3(3), 393-391.
- Martani, I. N., Hermawan, D., & Mouta, I. F. (2020). Penanggulangan Pra Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Lampung Selatan dalam Perspektif Collaborative Governance: Administrasi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 129-146. <https://doi.org/10.27960/administrativ.v2i1.25>
- Maulanari, R. (2020). Penanggulangan Bencana Banjir Di Sungai Batang Meras Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sungai Penuh. *Jurnal Administrasi Masyarakat*, 2(2), 43-51. <https://doi.org/10.51279/jam.v2i2.344>
- Misner Zahenna, Wardi, W. B. (2021). *ANALISIS PENGELOMPOK PEMELAYANAN SANITASI BERBASIS P34RTS/SMKT BERTAMBAH (STUKU MASUK: KOTA JANGKA PENYUH PROVINSI JAWA)*.
- Muhammad, F. L. & Anu, Y. M. A. (2020). Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dapudhokot, Kabupaten. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11(1), 52-61. <https://doi.org/10.27969/kebijakan.v11i1.2238>
- Mulya, Aswadi, & Sunarti. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Drainase Yang Berkelanjutan Serta Partisipasi Masyarakat. (Study Kasus Kecamatan II Kecamatan Kecamatan Pradak Tinggi Kota Sungai Penuh). *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 4(2), 17-23.
- Muslima, A., Masul, M., Tahir, A. G., Hadiyah, H., Saifi, S., & Kusuma, K. (2021). Kajian Lokasi Rawan Bencana Banjir Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Wilayah Kecamatan Dua Belas Kabupaten Berau. *Jurnal Arsitek Ekspres*, 21(2), 348-357. <https://doi.org/10.30965/ars.v21i2.1111>
- Muhammad, T., & Sadarna. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Bah di Kekawat Badengan Kota Pekanbaru. *Publikasi Jurnal Mawana*, 1(1), 82-98.
- Noto, T., & Doo, J. B. (2018). Firm' contribution to flood risk reduction-scenario-based experiments from Jakarta and Semarang, Indonesia. *Procedia Engineering*, 212(February), 567-574. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2018.01.073>
- Ningtyas, T., Latuati, E., Warsana, H., & Purwananti, H. (2020). *Multi-stakeholder Participation Challenges in Local Disaster Management Policies: A Case from Banjarsari District, Indonesia*. *IS4E (eprints)*, 417-424. <https://doi.org/10.2991/issn.e3c.2017.19.063>
- Ningtyas, T., Latuati, E., Warsana, H., & Purwananti, H. (2021). Optimization of Doctana policies (Resilience Disaster Village) to improve community preparedness for flood disaster in Banjarsari District, Indonesia. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 2(15), 113-126. <https://doi.org/10.24665/2522-1566/2021-1/15-06>
- Purnadisa, F., Singar, A. D., & Saiki, Y. M. (2022). *Geology and Potential Flash Flood Vulnerability*

- di Sungai Jambh Village and Serranadaga, Peradik Tinggi District, Nariasi Regency, Jambi
Jurnal Ecoetika, 6(1), 24–36. <https://doi.org/10.28956/jecoetika.vol6no1.14624>
- Prasetyo, R. D., Cahyo, Y., & Richeza, A. (2019). Analisis Perencanaan Sistem Drainase Dalam
Upaya Peninggalangan Banjir Di Kecamatan Gendakari Kabupaten Trenggalek. *Amal
Manajemen Teknologi & Politik*, 5(4), 2011–2131.
<https://doi.org/10.30737/jarmanika.v5i4-405>
- Qar, M. (2021). Collaborative Governance untuk Perbaikan Sungai Sekolah di Kota Palembang.
ISIT, 107–114.
- Rakradanti, R. L., Marudiah, L., Hartono, Y., & Sukarjo, U. M. (2022). Peran Penyedia Barang
Langsung dan Jasa oleh Siswa Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Produksi Hasil di
Kabupaten Selayar: The Role of Street Vendors and Service Providers by the Food and
Agriculture Office in Increasing Rice Production in Selayar Regy. *ISIT*, 211–223.
- Roski, D. (2022). Strategi Dalam Peninggalangan Rencana Daerah (RPDR) Dalam Mengatasi
Bencana Banjir Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.
Repository: IAR, 6-5.2017, 2005–2006.
- Rusdiana, A. A., Fauzi, A. R., & Shidi, I. T. (2022). Implementasi Kebijakan Pengendalian
Banjir di kawasan Sempadan Sungai Kali Lintang Kabupaten Gresik. *Jurnal Penelitian
Administrasi: FAWR: Jurnal Tarbiyah*, 0(2), 265–278.
- Rusli, F., & Adi, R. R. (2017). Studi Eksplorasi Pengetahuan Dari Siswa Terhadap Keterpaparan
Bencana Banjir Di SD Pribadi Kecamatan Bala Kabupaten Bojonegara. *Jurnal Teori
Dan Praktek Pembelajaran (PTP)*, 2(1), 1–5. <https://doi.org/10.17977/jun021a112017p001>
- Sariawati, H. A. P., Falyana, R., & Anyud, L. (2021). Collaborative Governance dalam Peningkatan
Banjir di Desa Tanjunghari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Widya Pendidikan*
<https://jurnal.uinibrah.ac.id/index.php/WIP>, 7(1), 169–175.
<https://doi.org/10.5201/issn.05746176>
- Setyowati, H. L. (2019). Perilaku Kebencanaan. *Prinsip Pendidikan Mitigasi Bencana*, 1–14.
- Sholaha, N. T. F. (2022). Collaborative Governance Dalam Peninggalangan Banjir Di Kota
Medan. *Jurnal Analis Masyarakat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Masyarakat-ekonomi*,
6(1), 161. <https://doi.org/10.31684/jam.v6i1.2022.161-174>
- Treda, C. E., Setiawan, S., & Harjanto, R. H. (2019). Perencanaan Kolaborasi Sebagai Salah
Satu Respons Defensitas di Pada Kalimantan Kalimantan Literatur. *Jurnal Berita Administrasi*,
25(2), 257–274. <https://doi.org/10.24259/jbau.v25i2.518>
- Therese, Y., Indarini, R., & Samsudjana, B. (2017). PELAYANAN PUBLIK BERBASIS GOOD
GOVERNANCE (Studi tentang Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan KTP di
Kecamatan Seberida Kota Sukoharjo). *JFAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(1), 668–
674. <https://doi.org/10.30998/jpap.v3i1.1237>
- Usamah, H. I., Mardha, N., & Anyud, B. (2022). Collaborative Governance Dalam
Peninggalangan Rencana Banjir Di Kabupaten Kepulauan Sela. *Jurnal Penelitian dan
Kerangka*, 4(6), 1249–1256.
- Widiaksono, A. (2018). Kolaborasi Multi Akor dalam Program Restorasi Gambut di Provinsi

- Rini. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 99-113. <https://doi.org/10.25077/japq.v4i2.111-125.2019>
- Yeny, S., Edul, R., & T. (2018). Penetapan Wilayah Bahaya Banjir Di Kota Sungai Penuh. *Jurnal Rainsa*, 2(5), 388. <https://doi.org/10.24016/jrad.v2i5.219>
- Sulipriati, T. (2016). Penguatan Institusi Lokal dan Menggerakkan Media Sosial Melalui Komunitas Untuk Menciptakan Kampung Berdaya. *JFAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)*, 4(1), 1004-1010. <https://doi.org/10.30996/japq.v4i1.1283>
- Zakaria, A. (2018). Paradigma Konstruktivisme-Progressif Dalam Pengujian Hukum. *Jurnal Hukum*, 04, 61-87.

Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	lppmstianusa.com Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	3%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	2%
4	bpbdspn.wordpress.com Internet Source	1%
5	123dok.com Internet Source	1%
6	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1%
7	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	1%
8	ejournalmalahayati.ac.id Internet Source	1%
9	jabarprov.go.id Internet Source	1%

10

journal.unesa.ac.id

Internet Source

1 %

11

journal.unpas.ac.id

Internet Source

1 %

12

docplayer.info

Internet Source

1 %

13

repo.bunghatta.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On